

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Arus globalisasi yang semakin pesat telah mendorong terjadinya pertemuan serta pertukaran nilai budaya di tengah masyarakat. Kemajuan dalam teknologi informasi dan tingginya mobilitas manusia membuat individu dari latar belakang budaya yang beragam lebih mudah untuk saling berinteraksi. Kondisi tersebut pada akhirnya membuka peluang yang lebih besar bagi individu dari latar belakang budaya yang berbeda untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, termasuk dalam membangun hubungan romantis hingga memasuki jenjang pernikahan antarbudaya. Dalam konteks *intercultural marriage*, komunikasi dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan budaya yang melekat pada latar belakang masing-masing pasangan, hal ini mencakup kesepakatan bersama yang dituju sebelum berlangsungnya pernikahan (Lubis et al., 2020). *Intercultural marriage* didefinisikan sebagai ikatan antara dua orang yang berasal dari latar budaya atau negara yang berbeda, namun tidak selalu menandakan perbedaan ras atau agama (Romano, 2008).

Terdapat beberapa alasan mengapa terjadinya pernikahan antarbudaya. Pertama, faktor lingkungan yang disebabkan oleh migrasi baik melalui relokasi maupun emigrasi yang mendorong individu untuk membangun kehidupan di lokasi baru, bertemu orang lain, menjalin hubungan, dan akhirnya membuat keputusan pernikahan. Kedua, karena faktor sosial yang muncul ketika individu membangun hubungan atau interaksi yang positif. Ketiga, pengaruh budaya seperti ketertarikan seseorang terhadap budaya tertentu yang mendorong mereka untuk menginginkan pernikahan dengan seseorang dari kelompok etnis yang mereka anggap menarik. Keempat, aspek kepribadian yang berkaitan dengan perilaku dan karakter pasangan yang tentunya menjadi pertimbangan karena pada dasarnya seseorang menginginkan pasangan yang cocok untuk membangun hubungan yang damai (Budiati, 2020). Penyebab terjadinya pernikahan antarbudaya karena individu yang

berpindah tempat tinggal, menempuh pendidikan, melakukan perjalanan wisata, bekerja di luar negeri, serta masyarakat yang memanfaatkan internet sebagai media untuk berkenalan dan berinteraksi (Romano, 2008).

Dalam masyarakat multikultural, pernikahan antarbudaya merupakan fenomena sosial yang semakin sering terjadi. Namun, pernikahan antarbudaya tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga dua sistem budaya yang berbeda. Perbedaan latar belakang budaya ini seringkali dapat menyebabkan masalah dalam komunikasi antarbudaya, terutama ketika pasangan dan anggota keluarga besar memiliki perspektif, nilai, dan gaya komunikasi yang berbeda. Jika tidak diimbangi dengan keterampilan komunikasi antarbudaya yang efektif perbedaan ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan hambatan dalam mencapai kesepahaman. Menurut Charley H.Dood komunikasi antarbudaya mencakup interaksi antara individu atau kelompok yang berpusat pada perbedaan latar belakang budaya yang memengaruhi perilaku komunikatif para peserta (Hasibuan & Muda, 2017).

Liliweri mengatakan fungsi komunikasi antarbudaya terdiri dari fungsi sosial dan fungsi pribadi. Fungsi pribadi meliputi penyampaian identitas sosial, promosi integrasi sosial, dan peningkatan pengetahuan. Sedangkan fungsi sosial meliputi pemantauan, penjemputan, promosi nilai-nilai, dan hiburan (Anwar, 2018). Komunikasi antarbudaya sangat penting untuk meningkatkan hubungan sosial antar individu dari beragam latar belakang budaya, mendorong pemahaman, toleransi, dan rasa hormat terhadap keberagaman. Melalui komunikasi yang efektif, individu dapat menciptakan citra diri yang konstruktif, memahami makna, dan menyesuaikan tindakan mereka dengan situasi budaya yang dihadapi.

Namun, dalam praktiknya proses komunikasi antarbudaya tidak selalu berjalan dengan lancar karena adanya berbagai perbedaan maupun cara pandang yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menurut Liliweri, hambatan komunikasi antarbudaya mengacu pada faktor apa pun yang menghambat pertukaran pesan antara pengirim dan penerima yang berpotensi mengurangi makna pesan-pesan tersebut. Interferensi dapat berasal dari komunikator, penerima, pesan, dan media.

Sehingga melemahkan upaya kolektif untuk menyampaikan makna pada pesan tersebut. Misalnya dipengaruhi oleh budaya, status sosial, tingkat pendidikan, basis pengetahuan, dan kemampuan berkomunikasi dapat berbeda dan menyebabkan hambatan antara komunikator dan penerima. Hambatan dari pesan dapat mencakup variasi makna pesan verbal dan perbedaan interpretasi pesan nonverbal (Anwar, 2018). Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi dalam konteks pernikahan.

Fenomena antarbudaya dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang kognitif yaitu kognisi individu (persepsi dan penalaran), kognisi interpersonal (ciri kepribadian), dan kognisi sosial (pembelajaran sosial, norma, kerja sama, dan moralitas). Dalam pernikahan antarbudaya, ketiga pendekatan ini beserta dimensi-dimensi terkaitnya memengaruhi proses komunikasi antara pasangan dari budaya berbeda yang mempertahankan sistem nilai sosial mereka sendiri (Barrett, 2020). Skema kognitif yang dibentuk oleh pengalaman budaya dibawa oleh setiap orang dan skema tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menafsirkan perilaku, simbol, serta pesan verbal dan nonverbal pasangannya. Ketika nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan, dan harapan sosial masing-masing pihak tidak sepenuhnya selaras, perbedaan persepsi dan sistem berpikir dapat menciptakan kesenjangan pemahaman.

Menurut Piotr Sztomp tradisi didefinisikan sebagai keseluruhan benda-benda material dan konsep yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga saat ini, utuh, tidak rusak, dan tetap diingat (Sudirana, 2019). Tradisi, nilai-nilai, dan aturan setiap suku telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Keragaman tradisi ini tidak hanya mencerminkan sejarah panjang dan pengetahuan masyarakat, tetapi menggambarkan pengaruh norma-norma sosial, agama, dan budaya terhadap pandangan dan tindakan individu di seluruh nusantara.

Keberagaman budaya tersebut turut memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap budaya memiliki cara penyampaian pesan dan makna yang berbeda. Hall dan Gudykunst,

mengkategorikan gaya komunikasi ke dalam dua kecenderungan utama yaitu *high context* dan *low context culture* berdasarkan gagasan bahwa budaya dapat dilihat dalam bentuk atau sifat penyampaian pesan dalam komunikasi masyarakat (Yang, 2016). Karena perbedaan gaya komunikasi ini, individu dari beragam latar belakang budaya sering kali memengaruhi cara mereka mengungkapkan pendapat dan perasaan, serta interpretasi mereka terhadap pesan dalam interaksi sehari-hari.

Di antara ciri-ciri lainnya, gaya komunikasi *high context* ditandai dengan kecenderungan terhadap ucapan tidak langsung dan sarat emosi, ketergantungan pada kecerdasan emosional, pemberian lebih banyak ilustrasi atau justifikasi, dan sering menggunakan keheningan sebagai sarana ekspresi. Di sisi lain, *low context* ditandai dengan ciri-ciri yang merupakan kebalikan dari hal-hal tersebut yaitu kecenderungan yang lebih besar terhadap teras teras dan keterbukaan, serta kecenderungan adanya masalah. Gaya-gaya seperti ini seringkali berupaya memengaruhi orang lain baik melalui cara implisit maupun eksplisit. Bagi masyarakat multikultural, hal tersebut dapat menyebabkan *culture shock* pada individu yang belum terbiasa akan budaya orang lain (Yang, 2016).

Culture shock mengacu pada keadaan kebingungan dan ketidaknyamanan sementara yang muncul karena berada di lingkungan yang asing dan kurang terbiasa dengan lingkungan tersebut (Martin & Nakayama, 2021). Di mana individu dalam situasi lintas budaya sering mengalami stres psikologis karena kebutuhan untuk beradaptasi dengan nilai, norma, dan kebiasaan baru. Situasi ini dapat muncul pada pasangan yang terlibat dalam pernikahan antarbudaya, seperti pasangan dari latar belakang budaya berbeda yang memiliki tradisi, nilai keluarga, dan adat pernikahan yang berbeda.

Ketika dua individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka potensi munculnya beragam permasalahan mulai dari prosesi menuju pernikahan hingga pasca pernikahan itu dapat terjadi. Dalam prosesi menuju pernikahan, perbedaan budaya kerap tercermin melalui praktik tradisi maupun mahar. Menurut Jejeebhoy mahar merupakan suatu nilai untuk pernikahan yang biasanya berupa perhiasan, pakaian, uang tunai, dan barang-

barang rumah tangga lainnya (Makino, 2018). Praktik mahar dan tradisi adat pada masing-masing budaya cenderung berbeda-beda. Perbedaan ini dapat terlihat dari bentuk pemberian, makna simbolis, hingga tata cara pelaksanaannya dalam prosesi pernikahan.

Untuk pasca pernikahan, perbedaan tersebut dapat terlihat dalam cara pasangan memahami peran gender, mengelola masalah, mengekspresikan emosi, serta memaknai nilai dan perilaku sosial. Selain itu, perbedaan budaya juga dapat memengaruhi pandangan mengenai pola pengasuhan anak, hubungan dengan keluarga besar, serta berbagai aspek lain dalam kehidupan rumah tangga (Samovar et al., 2017). Dengan demikian, pernikahan antarbudaya tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua sistem nilai dan tradisi berbeda yang membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif, toleransi, dan adaptasi budaya untuk hubungan yang harmonis.

Berdasarkan beragam perbedaan nilai, norma, dan praktik budaya dalam kehidupan keluarga, maka menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana perbedaan budaya memengaruhi dinamika komunikasi dan proses penyesuaian dalam pernikahan antarbudaya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Pemilihan suku Minang dan Jawa dalam penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan sistem nilai dan tradisi pernikahan yang cukup signifikan, seperti sistem kekerabatan, peran keluarga dalam proses pernikahan, hingga praktik adat yang menyertai pernikahan. Sehingga perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dalam proses komunikasi dan penyesuaian budaya bagi pasangan yang menjalani pernikahan antarbudaya. Dalam adat suku Minang, perempuan memiliki kedudukan yang sentral dalam struktur keluarga dan kaum, di mana peran ibu diposisikan sejajar dengan ayah dan mamak, serta perempuan yang berstatus *bundo kanduang* bertanggung jawab menjaga harta pusaka dan membina anak serta kemenakan dalam sistem kekerabatan matrilineal (Nuri, 2017).

Konsep *Kato Nan Ampek* mengatur komunikasi tradisional dalam suku Minang, berfungsi sebagai sistem etiket bicara yang menyesuaikan gaya komunikasi dengan status sosial orang yang dituju. Prinsip ini menentukan cara seseorang berkomunikasi dengan orang-orang dari beragam usia, termasuk yang lebih muda dan lebih tua dalam berbagai konteks adat dan sosial. Akibatnya, dalam suku Minang, komunikasi berfungsi bukan hanya sebagai cara untuk menyampaikan pesan tetapi juga sebagai demonstrasi rasa hormat terhadap struktur sosial dan nilai-nilai adat yang berlaku dalam komunitas tersebut (Ikhsan, 2023). Suku Minang cenderung berkomunikasi dengan cara *low context* yang ditandai dengan penyampaian pesan secara lebih langsung, jelas, dan terbuka dalam menyampaikan pendapat maupun perasaan kepada lawan bicara. Dalam pola komunikasi ini, makna pesan umumnya disampaikan melalui kata-kata yang eksplisit sehingga tidak terlalu bergantung pada konteks situasi atau isyarat nonverbal.

Sebaliknya, dalam suku Jawa, proses pernikahan lebih menekankan pada pertimbangan nilai dan kesiapan individu melalui ajaran peribahasa serta konsep *bibit, bebet, bobot* yang menegaskan bahwa pemilihan pasangan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik atau materi, tetapi juga pada asal-usul keluarga, lingkungan sosial, dan kualitas pribadi seperti pendidikan, kepribadian, serta nilai moral dan keagamaan (Adi, 2021).

Kesopanan dan rasa hormat kepada orang lain ditekankan dalam komunikasi dalam suku Jawa. Karena pengaruh usia, status sosial, dan konteks percakapan pada pola bicara suku Jawa, bahasa harus disesuaikan agar sesuai dengan individu yang diajak bicara. Sistem tingkatan bahasa, yang dikenal sebagai "*ungguh-ungguh bahasa*" berfungsi sebagai etiket komunikasi yang menunjukkan rasa hormat dan menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial suku Jawa (Hardiyanto, 2025). Suku Jawa cenderung berkomunikasi dengan cara *high context* yang ditandai dengan penyampaian pesan secara tidak langsung, penggunaan bahasa yang halus, serta penekanan pada isyarat nonverbal dan konteks situasi dalam memahami makna

komunikasi. Sehingga pesan disampaikan secara lebih implisit melalui pilihan kata yang sopan serta sikap yang menjaga keharmonisan hubungan sosial.

Tabel 1.1 Data Nikah dan Cerai

Provinsi	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Sumatera Barat	37.565	1.877	7.086	8.963
Jawa Tengah	225.401	13.828	53.672	67.500
DI Yogyakarta	18.432	1.018	4.184	5.202
Jawa Timur	262.670	19.824	63.384	83.208

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa provinsi, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat, menunjukkan jumlah perceraian yang relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Di Jawa Timur jumlah kasus perceraian melebihi 83.000, Jawa Tengah sekitar 67.500 dan di Sumatera Barat, jumlah perceraian yang tercatat mendekati 9.000 (Badan Pusat Statistik, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pernikahan merupakan lembaga sosial yang penting namun beragam masalah dan perbedaan dalam hubungan pasangan dapat mengakibatkan perceraian. Tingkat perceraian yang tinggi dapat disebabkan oleh beragam faktor, termasuk masalah keuangan, masalah dalam pernikahan, perbedaan nilai, dan kurangnya komunikasi serta pemahaman antara pasangan. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam budaya, perbedaan nilai budaya dapat menimbulkan hambatan dalam pernikahan, terutama bagi pasangan dari latar belakang yang berbeda. Gaya komunikasi, sistem nilai, dan tradisi keluarga dapat berbeda secara signifikan, yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman kecuali adanya kemampuan bersama untuk memahami dan beradaptasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Pratamawaty (2017) menunjukkan bahwa masalah dalam pernikahan antarbudaya sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pola pikir pasangan termasuk kesulitan komunikasi karena perbedaan bahasa, perbedaan pandangan dalam mendidik anak, perbedaan tujuan hidup, dll. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sa'adah & Widiastuti (2023) menemukan bahwa dalam pernikahan antarbudaya, terjadinya *culture shock* pada pernikahan antarbudaya terwujud melalui perbedaan dalam kebiasaan pengelolaan keuangan, perlakuan terhadap mertua, dan berbagai aspek kehidupan rumah tangga yang mungkin tidak dialami oleh pasangan yang menikah dalam budaya yang sama. Dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian mengenai kompetensi antarbudaya dan adaptasi budaya masi menjadi penelitian yang relevan dan menarik karena banyak pasangan beda budaya yang masih mengalami ketidakharmonisan dan mengalami *culture shock* akibat perbedaan latar belakang budaya dalam pernikahan.

Maka, dibutuhkannya proses adaptasi budaya yang di mana proses tersebut terjadi ketika individu memasuki budaya baru yang asing dan berinteraksi dengan unsur-unsur budaya tersebut (Martin & Nakayama, 2021). Selama proses ini, mereka secara bertahap mengenali persamaan dan perbedaan di lingkungan baru mereka. Konsep ini dipilih karena dalam pernikahan antarbudaya, pasangan tidak hanya menghadapi perbedaan nilai, norma, dan tradisi, tetapi juga kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan pandangan budaya pasangan dan keluarga besar mereka. Oleh karena itu, memahami proses adaptasi budaya sangat penting untuk memahami bagaimana individu menyesuaikan diri, memupuk saling pengertian, dan menjaga keharmonisan dalam pernikahan yang melibatkan dua latar belakang budaya yang berbeda.

Menurut (Samovar et al., 2017) dimensi individualisme dan kolektivisme adalah kecenderungan suatu budaya untuk mendorong seseorang agar menjadi unik dan mandiri atau saling bergantung. Budaya individualisme lebih mengutamakan individu dibandingkan kelompok, individu dipandang sebagai entitas yang berdaulat dan berdiri sendiri. Sedangkan budaya kolektivisme diberikan pada

kebutuhan dan tujuan kelompok, bukan pada diri sendiri. Hal tersebut berarti nilai-nilai seperti saling ketergantungan, pencapaian kelompok, kerja sama, dan hal-hal serupa menjadi prioritas utama. Penelitian terdahulu oleh Aflatooni & Daneshpour (2026) menunjukkan adanya masalah di mana pasangan dalam pernikahan antarbudaya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan orientasi budaya kolektivisme dan individualisme. Pasangan dari budaya kolektivisme cenderung mengharapkan keterlibatan keluarga besar dan hubungan yang saling bergantung, sedangkan pasangan dari budaya individualistik lebih mengutamakan otonomi dan kemandirian. Perbedaan orientasi tersebut juga dapat memengaruhi kepuasan pernikahan karena pasangan perlu menemukan solusi dari beragam ekspektasi budaya agar tercipta hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, kompetensi komunikasi antarbudaya menjadi kemampuan yang penting dimiliki oleh pasangan dalam pernikahan antarbudaya.

Untuk mencapai adaptasi budaya, individu dari beragam latar belakang budaya harus memiliki kompetensi komunikasi yang memungkinkan mereka untuk mengatasi perbedaan, mencegah kesalahpahaman, dan mendorong interaksi yang didasarkan pada rasa saling menghormati. Kompetensi komunikasi merupakan kemampuan seseorang untuk menangani aspek-aspek penting komunikasi antarbudaya seperti perbedaan budaya, dinamika antar kelompok, dan pengalaman yang menimbulkan stres (Samovar et al., 2017). Kompetensi ini mencakup mengenali perbedaan gaya komunikasi, nilai, norma, serta kemampuan untuk menyesuaikan perilaku komunikasi seseorang dengan latar belakang budaya lawan bicaranya. Kompetensi ini memungkinkan individu untuk membina hubungan yang harmonis, meminimalkan kesalahpahaman, dan meningkatkan efektivitas interaksi dalam konteks lintas budaya.

Topik ini dipilih oleh peneliti untuk dikaji karena pasangan dalam pernikahan antarbudaya dapat menghadapi hambatan sekaligus menemukan peluang yang muncul dari perbedaan nilai, norma, tradisi, dan gaya komunikasi saat mereka berupaya membangun hubungan yang harmonis. Pasangan dengan latar belakang suku Minang dan Jawa dipilih karena adat istiadat yang masih dijunjung tinggi serta

perbedaan yang cukup kontras dalam karakteristik tradisi unik yang menyajikan konteks menarik untuk mengeksplorasi bagaimana pasangan memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya satu sama lain. Suku Minang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal serta gaya komunikasi *low context* sedangkan suku Jawa lebih menekankan patrilineal dan penyelesaian masalah secara halus (*high context*). Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam menjalankan kehidupan sebelum menikah hingga pasca pernikahan, sehingga pasangan perlu melakukan proses penyesuaian terhadap nilai serta kebiasaan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang bahwa kompetensi budaya merupakan kemampuan yang penting dimiliki oleh pasangan dalam menyesuaikan diri terhadap perbedaan budaya. Kemampuan tersebut memungkinkan pasangan membangun komunikasi yang efektif serta menjalani proses adaptasi budaya secara positif.

1.2 Rumusan Masalah

Pernikahan antarbudaya memiliki implikasi bagi cara pasangan mengekspresikan emosi, relasi, peran gender, pola asuh anak, dan gaya komunikasi antar pasangan maupun keluarga besar. Hal ini disebabkan oleh variasi nilai, sudut pandang, standar, dan sistem kepercayaan yang dianut oleh individu dari beragam latar belakang budaya. Dalam konteks ini, proses adaptasi budaya sangat penting bagi setiap pasangan untuk secara efektif mengelola perbedaan tersebut dan mempertahankan keharmonisan pernikahan. Pentingnya kompetensi budaya terkait erat dengan proses adaptasi budaya, karena memungkinkan individu untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan praktik budaya pasangannya sehingga meminimalkan kesalahpahaman dan mendorong komunikasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana perbedaan nilai, sudut pandang, dan tradisi suku Minang dan Jawa terwujud dalam pola komunikasi dalam pernikahan antarbudaya khususnya dari fase pra-nikah hingga kehidupan pasca-nikah yang melibatkan kedua pasangan dan keluarga besar mereka. Penelitian ini juga meneliti beberapa hambatan komunikasi yang muncul dari perbedaan budaya, pentingnya kompetensi budaya

pasangan dalam mengatasi masalah ini, penerapan proses adaptasi budaya, dan strategi komunikasi untuk menumbuhkan pemahaman, membangun kesepakatan bersama, dan memastikan keharmonisan dalam pernikahan antarbudaya antara pasangan suku Minang dan Jawa.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hambatan-hambatan yang dihadapi pasangan dalam pernikahan antarbudaya antara suku Minang dan Jawa?
2. Bagaimana proses adaptasi budaya yang dilakukan oleh pasangan suku Minang dan Jawa dalam menjalani kehidupan pernikahan antarbudaya?
3. Bagaimana peran kompetensi budaya dalam mendukung proses adaptasi budaya pasangan suku Minang dan Jawa dalam pernikahan antarbudaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi pasangan dalam pernikahan antarbudaya antara suku Minang dan Jawa.
2. Untuk memahami dan menganalisis proses adaptasi budaya yang dilakukan oleh pasangan suku Minang dan Jawa dalam menjalani kehidupan pernikahan antarbudaya.
3. Untuk menganalisis peran kompetensi budaya dalam mendukung keberhasilan adaptasi budaya pasangan suku Minang dan Jawa dalam pernikahan antarbudaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Diharapkan studi ini akan memberikan manfaat yang signifikan pada bidang akademik maupun praktis. Harapan dari penelitian ini bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada bidang studi komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi antarbudaya dalam konteks pernikahan antarbudaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kompetensi budaya dan adaptasi budaya dalam pernikahan antarbudaya, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya pada topik serupa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pasangan atau calon pasangan dari latar belakang budaya yang beragam perspektif baru dalam mengelola pola komunikasi yang efektif di hadapan perbedaan budaya, terutama terkait kompetensi budaya dan adaptasi budaya dalam pernikahan antarbudaya. Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif guna mencapai kesepakatan yang menghormati nilai-nilai budaya semua pihak yang terlibat.

1.5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang berfokus pada dua pasangan suku Minang dan Jawa yang telah menjalani pernikahan selama 4 tahun lebih. Di mana masing-masing informan berusia 28, 29, dan 35. Hal ini tidak berarti bahwa semua pasangan antarbudaya di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang sama.